



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIS DARMANSYAH EDISAPUTRA
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
3. NHK : 413469

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.600.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/165 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Bangunan Seluas 6 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Bangunan Seluas 4 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Bangunan Seluas 5 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **350.000.000**

1. MOTOR, KYMCO DOWNTOWN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **---**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	17.669.051
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.967.669.051
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.967.669.051

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.